

Peran KSPPS Yaummi MAS Cabang Cilacap dalam
Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Yudi Mario Herwindo¹, Denas Hasman Nugraha²
^{1,2} STAI Terpadu Yogyakarta

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Submitted Nov 10, 2025 Accepted Nov 10, 2025 Published Nov, 30 2025 <i>Keywords:</i> Economic Empowerment, Sharia Cooperatives, Microfinance, Social Capital	<i>This research analyzes the role of KSPPS Yaummi MAS Cilacap Branch in empowering the local economy through sharia financing, business training and strengthening social capital. The research gap that was raised was the lack of studies on how sharia financing mechanisms in micro cooperatives actually produce economic changes for members, especially small business actors. The method used is descriptive qualitative through observation, in-depth interviews and documentation. The research results show that KSPPS provides access to microfinance without asset collateral, provides training in business management and financial recording, and strengthens solidarity through regular meetings and the ta'awun system. The impact of empowerment can be seen from the increase in income and business skills of members, especially women. The main obstacles include limited assistance, weak market access, and not yet optimal impact evaluation. Digitalization and expanded partnerships are recommended to increase the effectiveness of sustainable empowerment.</i>

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut adalah penguatan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan langsung dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat bawah. Lembaga ini, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), telah menjadi motor penggerak perekonomian lokal di berbagai daerah di Indonesia.¹

KSPPS memiliki karakteristik unik karena menggabungkan prinsip koperasi dan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonominya. Sistem bagi hasil, larangan riba, dan prinsip keadilan menjadi fondasi utama yang

¹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Laporan Tahunan 2024: Transformasi Digital Koperasi Syariah*, Jakarta, 2024.

membedakannya dari lembaga keuangan konvensional.² Melalui pendekatan ini, KSPPS tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mengedepankan nilai kebersamaan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota.³

Secara teoretis, pemberdayaan ekonomi merupakan proses membangun kemandirian individu dan kelompok masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokalnya.⁴ Dalam konteks keuangan syariah, pemberdayaan dilakukan melalui pendanaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan jaringan usaha antar anggota.⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan sosial dan keseimbangan distribusi ekonomi.⁶

Penelitian terkini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut studi oleh Maulida dan Santoso, lembaga KSPPS berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta membuka akses modal bagi UMKM di daerah pedesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa KSPPS bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga lembaga sosial yang berperan dalam transformasi ekonomi masyarakat.⁷

KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki visi memberdayakan masyarakat lokal melalui pembiayaan berbasis syariah. KSPPS ini berfokus pada pembiayaan mikro, pembinaan anggota, dan peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat di Kabupaten Cilacap.⁸ Daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang besar di sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan UMKM yang tersebar di wilayah pesisir maupun pedalaman.⁹

KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pembiayaan mikro dan pembinaan usaha di wilayah dengan potensi ekonomi lokal yang besar. Namun, berbagai kendala masih tampak, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya pemanfaatan

² Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2023

³ Fauzan, H., "Implementasi Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2023).

⁴ Yunita, D., "Konsep Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Al-Mashraf*, Vol. 5 No. 1 (2023).

⁵ Ningsih, S. & Harahap, F., "Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi Syariah," *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, Vol. 7 No. 3 (2024)

⁶ Zuhdi, A., *Maqashid Syariah dan Ekonomi Keadilan*, Bandung: Alfabeta, 2023

⁷ Maulida, R. & Santoso, E., "Peran KSPPS dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10 No. 1 (2023)

⁸ Dokumentasi Data Internal KSPPS Yaummi Mas, Laporan Kinerja Cabang Cilacap 2024

⁹ BPS Kabupaten Cilacap, *Profil Ekonomi Daerah 2024*

teknologi digital, lemahnya akses pasar, serta belum optimalnya pendampingan pasca pembiayaan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya pemanfaatan teknologi digital, serta lemahnya jaringan pemasaran bagi pelaku usaha kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas peran KSPPS belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan strategi pemberdayaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.¹⁰

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachman menunjukkan bahwa KSPPS Mandiri Artha Sejahtera mampu meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan pendampingan intensif. Namun, tantangan muncul pada aspek pengawasan dan pendampingan pasca pembiayaan yang belum berjalan konsisten.¹¹ Kondisi serupa juga berpotensi dialami oleh KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap.

Selain itu, hasil studi oleh Syarifuddin dan Lestari mengungkapkan bahwa koperasi syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal jika didukung oleh partisipasi anggota yang aktif, kepemimpinan yang visioner, dan penerapan digitalisasi layanan.¹² Peran KSPPS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sejalan dengan tujuan tanpa kemiskinan dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, karena layanan pembiayaan syariah yang diberikan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan usaha mikro di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas KSPPS tidak hanya penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses modal, pelatihan manajemen keuangan, dan penguatan jaringan usaha antaranggota. Namun, tingkat keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada konsistensi program pendampingan dan transparansi pengelolaan dana.¹⁴

Pada masa pascapandemi COVID-19, digitalisasi menjadi tantangan baru bagi lembaga keuangan mikro termasuk KSPPS. Menurut penelitian

¹⁰ Rahmawati, D., "Kendala Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Syariah," *Jurnal Ekonomi Umat*, Vol. 5 No. 2 (2023).

¹¹ Rachman, T., "Analisis Peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam Penguatan UMKM," *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 9 No. 2 (2022).

¹² Syarifuddin, M. & Lestari, I., "Digitalisasi dan Efektivitas Koperasi Syariah," *Jurnal Inklusif Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2024).

¹³ UNDP Indonesia, *SDGs Report 2024: Local Economic Empowerment through Islamic Finance*, Jakarta, 2024

¹⁴ Nurfadillah, S., "Kontribusi LKMS terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 12 No. 2 (2023).

oleh Prasetyo (2024), adopsi layanan digital dalam lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas jangkauan keanggotaan. Dengan demikian, inovasi digital di KSPPS Yaummi Mas menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing dan efektivitas pemberdayaan ekonomi lokal.¹⁵

Selain faktor internal, keberhasilan KSPPS juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah, lingkungan sosial, dan kemitraan dengan lembaga eksternal. Program sinergi antara KSPPS dan pemerintah daerah terbukti mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Banyuwangi.¹⁶ Hal ini menjadi inspirasi bagi KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap untuk memperluas kolaborasi lintas sektor.

Kajian dari Arifin dan Sari menunjukkan bahwa partisipasi aktif anggota koperasi syariah merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan. Partisipasi tersebut meliputi keikutsertaan dalam rapat, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, dan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial ekonomi bersama. Oleh karena itu, strategi KSPPS Yaummi Mas perlu diarahkan untuk memperkuat partisipasi anggota sebagai pondasi kelembagaan.¹⁷

Penting pula untuk meninjau aspek etika dan transparansi pengelolaan lembaga syariah. Studi yang dilakukan oleh Dewi menemukan bahwa tingkat kepercayaan anggota meningkat signifikan ketika lembaga menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan. Transparansi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi juga meningkatkan loyalitas anggota terhadap KSPPS.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa KSPPS berpotensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas manajemen, inovasi digital, partisipasi anggota, dan dukungan kebijakan pemerintah.²⁹ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara empiris sejauh mana KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah dan program pemberdayaan yang dijalankannya.¹⁹

¹⁵ Prasetyo, H., "Digitalisasi Koperasi Syariah Pasca COVID-19," *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, Vol. 11 No. 1 (2024).

¹⁶ Hasanah, N., "Sinergi KSPPS dan Pemerintah Daerah," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2023).

¹⁷ Arifin, Z. & Sari, D., "Peran Partisipasi Anggota dalam Keberhasilan Koperasi Syariah," *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*, Vol. 5 No. 3 (2023).

¹⁸ Dewi, F., "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Koperasi Syariah," *Jurnal Etika Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023).

¹⁹ Ningsih, S., *Koperasi Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2024

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana institusi keuangan mikro berbasis syariah seperti KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelaah fenomena sosial ekonomi serta religius dalam konteks yang alami dan menyeluruh, bukan dalam bentuk angka statistik saja. Studi terkini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).²⁰

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposive karena lembaga tersebut dikenal menjalankan program pembiayaan produktif berbasis syariah serta memiliki aktivitas pembinaan anggota yang cukup sistematis yang menjadikan lokasi ini relevan untuk penelitian pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendekatan koperasi syariah. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, dari Juni hingga Agustus 2025, mencakup tahapan observasi lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumentasi, serta analisis data. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti berinteraksi langsung dengan manajemen, staf lapangan, dan anggota penerima pembiayaan untuk mengungkap praktik pengelolaan, pola pembiayaan, pembinaan usaha dan dampak ekonomi sosial yang terjadi di tingkat komunitas. Studi terkini menyarankan bahwa untuk memahami peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian lapangan sangat diperlukan.²¹

²⁰ Solikin, Solikin, Abdul Haris Romdhoni & Sumadi. Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 02, 2024. DOI:10.29040/jiei.v11i02.17239

²¹ Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F. ., Salzabil, A. Z. ., & Jannah, M. (2025). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang : Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer cabang, staf lapangan, serta anggota yang telah memperoleh pembiayaan dan mengikuti program pembinaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal lembaga seperti laporan tahunan, data pembiayaan anggota, pedoman operasional, materi pelatihan, foto kegiatan, serta literatur akademik terkait koperasi syariah dan pemberdayaan ekonomi. Kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana lembaga tersebut mengelola pembiayaan dan pembinaan serta bagaimana dampaknya terhadap ekonomi anggota maupun komunitas lokal.²²

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan pembiayaan, interaksi antara staf dan anggota, serta pelaksanaan program pembinaan usaha. Wawancara semi-terstruktur diterapkan agar peneliti dapat menggali secara mendalam sekaligus fleksibel sesuai dengan dinamika pembicaraan tema seperti kriteria pembiayaan, mekanisme pengawasan, strategi pembinaan, hambatan yang dihadapi anggota, dan indikator keberhasilan program dibahas. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi bukti tertulis maupun visual atas pelaksanaan program dan laporan keuangan mikro, foto kegiatan, brosur program, daftar peserta pelatihan, catatan hasil evaluasi anggota. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan melalui triangulasi (metode dan sumber) agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.²³

Analisis data dilakukan secara interaktif dan kontinu mengikuti model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian: strategi pemberdayaan, jenis pembiayaan produktif, sistem pembinaan, dan indikator perubahan ekonomi anggota. Penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan ke dalam uraian naratif yang sistematis, dilengkapi kutipan langsung dari wawancara dan hasil dokumentasi agar hubungan antar konsep ini dapat terlihat dengan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola empiris yang muncul dari data dan mengaitkannya

²² Riduwan, Amrullah, Danupranata, G., & Wahyudi, R. (2024). Microfinancing, Preference and Loyalty Analysis: A Study of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 248–263. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.366>

²³ S. Hartanto, T. Suparyanto & A. Azwar, "Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review", *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 2023

dengan teori pemberdayaan ekonomi syariah, manajemen koperasi syariah, dan literatur keuangan mikro Islam.²⁴

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan dari berbagai informan (manajer, staf lapangan, anggota) untuk memastikan konsistensi data. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar hasilnya tidak bergantung pada satu metode saja. Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan mengonfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada narasumber utama untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan realitas di lapangan. Pendekatan-pendekatan ini sesuai dengan praktik terbaik dalam penelitian lembaga keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁵

Lokasi penelitian adalah KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan berlangsung selama tiga bulan, yaitu juni hingga Agustus 2025, mencakup seluruh rangkaian pengumpulan data lapangan, analisis awal, dan verifikasi hasil dengan pihak lembaga. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap menjalankan peran pemberdayaan ekonomi lokal – termasuk bagaimana strategi, nilai, dan praktik syariah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap menjalankan fungsi utama sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan rumah tangga produktif. Skema pembiayaan yang digunakan dirancang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba sehingga memberikan alternatif bagi anggota yang tidak dapat mengakses kredit bank konvensional.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus cabang dan staf lapangan, diperoleh informasi bahwa kriteria penyaluran pembiayaan lebih menekankan kelayakan usaha dan kemampuan pengembalian melalui mekanisme bagi hasil margin yang sesuai syariah, dibanding penekanan

²⁴ Miles, M. B. & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

²⁵ A. Y. Zahrani, *peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) dalam pemberdayaan ekonomi umat: tinjauan Konseptual*, JEI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 10, Nomor 1: Januari – Juni 2025

²⁶ Muhammad Nafik H.R., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 87–92.

jaminan aset, sehingga meningkatkan inklusi finansial bagi pelaku usaha yang tidak memiliki agunan. Praktik ini sejalan dengan model KSPPS yang banyak diadopsi di Indonesia.²⁷

Observasi lapangan dan dokumentasi memperlihatkan bahwa KSPPS Yaummi Mas tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga menjalankan program pembinaan bagi anggota: pelatihan manajemen usaha sederhana, pencatatan keuangan mikro, dan pendampingan pemasaran. Program pembinaan ini dilaporkan membantu anggota memperbaiki manajemen usaha meskipun intensitas pendampingan bervariasi antar klaster usaha.²⁸

Penelitian ini menemukan bahwa peran utama KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap adalah menyediakan akses pembiayaan mikro berbasis syariah bagi pelaku usaha mikro dan rumah tangga produktif di wilayah setempat. Skema pembiayaan yang diberlakukan menekankan prinsip-prinsip syariah (keadilan, transparansi, dan bagi hasil/margin wajar), sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh modal dari perbankan konvensional. Mekanisme penyaluran pembiayaan KSPPS cenderung mengedepankan kelayakan usaha dan kemampuan usaha untuk kembali menghasilkan kas, bukan semata jaminan aset. Pendekatan ini memperbesar inklusi finansial karena memungkinkan pelaku usaha kecil tanpa agunan formal tetap mendapat modal kerja. Selain penyaluran modal, KSPPS Yaummi Mas menjalankan program pembinaan yang meliputi pelatihan manajemen usaha sederhana, pencatatan keuangan mikro, dan teknik pemasaran dasar. Kegiatan pembinaan ini umumnya diberikan secara berkala dan bersifat praktis sesuai kebutuhan usaha anggota.²⁹

Skema pembiayaan yang ditawarkan koperasi mencakup pembiayaan modal kerja, pembiayaan produktif mikro, serta pembiayaan musiman yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor usaha tertentu. Produk simpanan seperti simpanan berjangka dan simpanan Haji/Umrah juga menjadi bagian dari layanan untuk mendukung perencanaan keuangan keluarga anggota.³⁰ Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui mekanisme seleksi usaha yang menekankan kelayakan usaha dan kemampuan menghasilkan arus kas, bukan pada jaminan fisik. Hal ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi

²⁷ Hasil Wawancara dengan kepala KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Cabang Cilacap

²⁸ Hasil Observasi Yaummi Maziyah Assaadah Cabang Cilacap

²⁹ Pusporini, P., Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. (2025). *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(03)

³⁰ Siti Rahmah & Diah Lestari, "Produk Simpanan dan Pembiayaan Koperasi Syariah," *Journal of Islamic Finance and Society*, Vol. 4 No. 2 (2023): 112-124.

pelaku usaha mikro tanpa agunan formal untuk memperoleh modal kerja, sehingga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.³¹

Selain penyaluran modal, KSPPS menjalankan program pembinaan manajemen usaha melalui pelatihan sederhana mengenai pencatatan keuangan, pengendalian stok, analisis biaya, serta pemasaran dasar. Program ini dirancang agar mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro yang umumnya belum memiliki literasi manajemen formal.³² Pendampingan usaha tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui kunjungan lapangan oleh staf pembina. Kunjungan ini bertujuan memantau perkembangan usaha, memberikan saran teknis, serta mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Namun, intensitas pendampingan masih terkendala jumlah staf yang terbatas.³³

KSPPS juga berkontribusi dalam pembentukan modal sosial melalui kelompok usaha, forum anggota, dan kegiatan ta'awun yang mendorong solidaritas antaranggota. Modal sosial ini memperkuat hubungan informal seperti berbagi informasi pasar, rekomendasi pemasok, dan dukungan moral sesama pelaku usaha.³⁴ Forum diskusi anggota menjadi wadah penting untuk saling bertukar pengalaman usaha. Pertemuan tersebut menciptakan jejaring informasi yang membantu anggota memahami dinamika pasar lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran.³⁵

Dampak ekonomi dari pembiayaan syariah terlihat dari meningkatnya likuiditas usaha anggota, bertambahnya modal kerja, serta penurunan ketergantungan pada rentenir. Margin pembiayaan yang wajar dan skema cicilan proporsional memberikan kelonggaran bagi usaha kecil dalam menjaga stabilitas arus kas.³⁶ Pembiayaan mikro disertai pelatihan kewirausahaan terbukti meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Banyak perempuan memulai usaha rumahan seperti kuliner dan kerajinan,

³¹ Ahmad Jazuli, "Inklusi Keuangan Mikro Syariah bagi UMKM," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 1 (2023): 45–59

³² Nur Fitriana, "Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM Binaan Koperasi Syariah," *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, Vol. 5 No. 1 (2022): 78–89.

³³ Andi Wijaya, "Peran Pendampingan Lapangan dalam Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 (2021): 33–47.

³⁴ Syamsul Huda, "Modal Sosial dalam Koperasi Syariah," *Al-Idarah*, Vol. 11 No. 1 (2023): 55–67.

³⁵ Ratna Puspita, "Kekuatan Forum Anggota dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Journal of Cooperative Studies*, Vol. 3 No. 1 (2022): 95–107.

³⁶ Aulia Rahman, "Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Peningkatan Usaha," *Indonesian Journal of Microfinance and Development*, Vol. 4 No. 1 (2021): 34–48

yang kemudian berkembang setelah mendapatkan tambahan modal.³⁷ Aktivitas pembiayaan dan simpanan memperkuat perputaran ekonomi lokal. Dana yang dihimpun koperasi disalurkan kembali kepada anggota sehingga menciptakan siklus ekonomi yang tumbuh dari dan untuk masyarakat sekitar.³⁸

Meski memiliki dampak positif, penelitian menemukan sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pemberdayaan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas internal, termasuk jumlah staf pendamping yang minim dan sistem monitoring yang masih manual. Hal ini menyulitkan koperasi untuk mengevaluasi dampak secara kuantitatif.³⁹ Kendala lain adalah akses pasar yang terbatas. Meskipun produksi meningkat setelah mendapatkan modal, banyak anggota belum memiliki kemampuan pemasaran digital, branding produk, maupun akses ke jaringan distribusi di luar wilayah lokal. Upaya KSPPS membantu pemasaran masih bersifat sporadis dan belum terstruktur melalui kemitraan formal.⁴⁰ Namun, KSPPS memiliki peluang besar untuk mengembangkan program pemberdayaan melalui digitalisasi layanan koperasi, seperti penggunaan aplikasi pencatatan digital, sistem transaksi online, dan dashboard monitoring dampak. Digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat basis data koperasi dalam pengambilan keputusan.⁴¹

Keterbatasan kapasitas kelembagaan KSPPS dalam melakukan pendampingan intensif dan monitoring berkelanjutan. Jumlah staf pembina yang terbatas dan sistem pencatatan manual menyulitkan pengukuran dampak jangka panjang secara kuantitatif. Dari sisi pemasaran, banyak anggota masih mengalami kendala akses pasar: produksi meningkat setelah mendapat modal, tetapi jaringan distribusi, *branding*, dan akses ke pasar di luar wilayah lokal masih lemah. Hal ini menghambat potensi kenaikan pendapatan usaha dalam skala lebih besar. Pada beberapa kasus, KSPPS berperan langsung dalam promosi produk anggota mis. melalui kegiatan bazar, pembelian komoditas anggota oleh koperasi, atau pengenalan ke

³⁷ Mar'atus Sholihah, "Pemberdayaan Perempuan melalui Pembiayaan Mikro Syariah," *Gender and Community Development Journal*, Vol. 5 No. 2 (2023): 142–156.

³⁸ R. Kurniadi, "Perputaran Ekonomi Lokal melalui Koperasi," *Local Economic Studies*, Vol. 2 No. 3 (2022): 210–220

³⁹ D. K. Syafruddin, "Tantangan Operasional KSPPS di Era Modern," *Jurnal Akuntabilitas Koperasi*, Vol. 6 No. 2 (2024): 65–78.

⁴⁰ Dwi Setyaningsih, "Akses Pasar UMKM dan Tantangan Digitalisasi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, Vol. 6 No. 3 (2023): 210–222.

⁴¹ Rachmat Kurniawan, "Digitalisasi Koperasi Syariah dan Penguatan Monitoring," *Journal of Cooperative and Community Empowerment*, Vol. 2 No. 1 (2024): 1–15

jaringan local namun intervensi ini sering berlangsung ad hoc dan belum berupa kemitraan pemasaran yang terstruktur.⁴²

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap telah menjalankan peran penting sebagai akses finansial, penyedia pembinaan, dan penguat modal sosial, namun efektivitas dampak jangka panjang dipengaruhi oleh kapasitas internal, kemampuan akses pasar anggota, dan ketersediaan data kuantitatif yang memadai untuk mengukur kenaikan pendapatan atau pengurangan kemiskinan. Kendala lain yang muncul ialah keterbatasan data dan pengukuran dampak. Banyak evaluasi yang bersifat deskriptif dan naratif; sedikit yang menyediakan indikator terukur seperti persentase kenaikan omzet, jumlah tenaga kerja tambahan, atau indikator penurunan kerentanan ekonomi. Ketidadaan pengukuran ini menyulitkan pembuktian kuantitatif atas efektivitas program. Tren digitalisasi menjadi pilihan strategis untuk mengatasi beberapa kelemahan ini. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi layanan koperasi (aplikasi transaksi anggota, pencatatan digital, dashboard M&E) dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas monitoring, sehingga memungkinkan pengukuran dampak yang lebih andal. Namun, adopsi digital harus disesuaikan dengan tingkat literasi anggota. Sinergi dengan pemangku kepentingan local seperti Dinas Koperasi/UMKM, pasar tradisional, pesantren, dan pelaku swasta menjadi kunci memperluas jangkauan program pemberdayaan. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kemitraan formal meningkatkan akses pasar dan program pelatihan yang lebih terstruktur. Secara makro, peran KSPPS berkontribusi pada sirkulasi ekonomi lokal: dana yang dihimpun dari anggota kembali disalurkan ke usaha lokal sehingga mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa/kelurahan. Efek multiplikatif ini, meskipun sulit diukur dengan data lokal terbatas, terlihat dalam peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar pusat kegiatan koperasi.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menegaskan bahwa KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal terutama melalui akses modal yang adil, pembinaan usaha, dan penguatan jaringan sosial, namun untuk mencapai dampak terukur yang lebih luas diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, serta kemitraan pemasaran yang lebih ketat. Peluang penguatan kemitraan strategis dengan Dinas Koperasi/UMKM, pesantren, pasar tradisional, dan sektor swasta juga sangat besar. Dengan memperkuat kemitraan, koperasi dapat menyediakan

⁴² Suaidah & Zuhri M. Nawawi, "Tantangan Pengembangan LKMS melalui UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 7 No. 1 (2024).

⁴³ N. Fadhilah & D. Darmawati, "Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah" in *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2023).

pelatihan berbasis kebutuhan pasar, memperluas jalur pemasaran, serta memperkuat keberlanjutan program yang berpotensi menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi yang kuat dan inklusif di tingkat lokal.

b. Pembahasan

Pada umumnya peranan sangat di butuhkan dalam pengembangan usaha yang nantinya akan menghasilkan pendapatan, suatu keberhasilan usaha dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan perkembangan usaha yang sedang di jalankan baik diusaha perdagangan maupun pertanian. Proses penelitian setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mambukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada anggota koperasi tersebut dan mencatat hasil wawancara, selanjutnya perhatian peneliti pada objek peneltian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah didapat peneliti bagaimana koperasi meningkatkan pemberdayaan anggota di Kabupaten Cilacap.

Peranan merupakan suatu kedudukan di mana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat padanya. Dengan kata lain, ketika individu atau lembaga melaksanakan tugasnya sesuai kedudukan, maka ia telah menjalankan perannya secara optimal.⁴⁴ Koperasi didirikan sebagai wadah ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui asas kekeluargaan dan gotong royong.⁴⁵ Dalam konteks tersebut, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berperan penting sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menyediakan akses permodalan dan layanan keuangan bagi anggota untuk mendorong kemandirian ekonomi umat.⁴⁶

Peran koperasi dapat tercapai secara efektif, maka koperasi perlu menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Salah satu bentuk kegiatan utama KSPPS adalah memberikan layanan simpan pinjam dan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan modal usaha anggota, tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip ta'awun (tolong-

⁴⁴ Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 112.

⁴⁵ Hendar & Kusnadi. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 45

⁴⁶ Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2023, hlm. 78.

menolong) dalam sistem ekonomi Islam.⁴⁷ Melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan transparan, KSPPS diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang berkualitas, memperkuat daya saing ekonomi anggota, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat luas.⁴⁸

Peran yang dijalankan oleh koperasi tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya. Keterlibatan anggota menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya satu pihak yang berkontribusi; oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada sinergi antara pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan usaha.⁴⁹ Partisipasi anggota tidak hanya berbentuk keikutsertaan dalam kegiatan simpan pinjam, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.⁵⁰

Dalam konteks ini, partisipasi anggota menjadi wujud nyata dari prinsip dasar koperasi, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Melalui partisipasi aktif, tujuan utama koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat diwujudkan secara berkelanjutan.⁵¹ Hal ini sejalan dengan teori koperasi menurut Abi Pratiwa (2022) yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang maupun perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian koperasi dan anggota sudah sama-sama berperan dalam meningkatkan pendapatan, pihak koperasi dan anggota melakukan kerjasama yang baik untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya serta meningkatkan pendapatan anggota dan

⁴⁷ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 154

⁴⁸ Mulyaningrum, Siti. "Peran KSPPS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No. 1 (2024): 55–68

⁴⁹ Sutrisno, Budi. "Partisipasi Anggota sebagai Kunci Keberhasilan Koperasi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat*, Vol. 8 No. 2 (2023): 101–115

⁵⁰ Rahman, Ahmad. *Manajemen Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 89

⁵¹ Sari, Lilis Purnama. "Hubungan Partisipasi Anggota dan Kinerja Koperasi terhadap Kesejahteraan Anggota." *Jurnal Koperasi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2024): 45–59

⁵² Abi Pratiwa. *Hukum dan Prinsip Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 34.

pendapatan koperasi tentunya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan syariah memperbesar inklusi finansial bagi pelaku usaha kecil mendukung literatur yang menyebut lembaga keuangan mikro syariah (BMT/KSPPS) sebagai salah satu instrumen inklusi keuangan alternatif yang sesuai konteks lokal Indonesia. Konsep margin/bagi hasil dan pendekatan tanpa agunan memungkinkan pelaku usaha informal lebih mudah mengakses modal. Hal ini dipertegas oleh hasil studi SLR dan studi lapangan pada BMT di beberapa daerah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Khoiruddin, dkk menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan dan pelaporan di lembaga keuangan mikro syariah secara signifikan meningkatkan akurasi dan efektivitas monitoring. Keterbatasan tersebut menjelaskan mengapa perlu adanya modernisasi sistem di KSPPS Yaummi Mas. Hambatan akses pasar yang dialami anggota juga berkaitan dengan lemahnya integrasi rantai nilai. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa UMKM membutuhkan dukungan akses pasar agar peningkatan kapasitas usaha dapat berdampak pada pendapatan. Temuan ini memberikan bukti bahwa pembiayaan saja tidak cukup untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif.⁵³

Peran pembinaan usaha (*capacity building*) yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan komponen kunci dalam proses pemberdayaan ekonomi anggota. Upaya peningkatan kapasitas tidak cukup hanya dengan memberikan modal finansial; pengetahuan manajerial, kemampuan pencatatan sederhana, serta keterampilan pemasaran juga menjadi prasyarat penting agar pembiayaan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha anggota. Literatur terkini tentang penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan pentingnya sinergi antara bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan sebagai praktik terbaik dalam pembangunan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.⁵⁴

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ayu Zahrani, Dkk menunjukkan bahwa peran krusial Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan fokus pada penyediaan akses pembiayaan mikro yang inklusif, distribusi keuntungan yang adil, serta inisiatif pemberdayaan sosial dan moral. KSPPS memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung perkembangan ekonomi umat, efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

⁵³ Khoirudin, Juliana Juliana, *Digitalization Of Islamic Microfinance Institutions: Opportunities, Challenges, And Economic Implications For The Muslim Community*. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5, No 2 (2025)

⁵⁴ Suryani, Tika & Hamdani, Dedi. "Integrasi Modal dan Pelatihan dalam Penguatan UMKM Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kewirausahaan*, Vol. 11 No. 2 (2024): 88–101

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya pemahaman tentang konsep pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan kontribusi KSPPS dalam konteks tersebut. Dari perspektif manajerial, hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola KSPPS dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan efektif, termasuk dalam hal pelatihan anggota serta penguatan tata kelola lembaga.⁵⁵

Temuan lapangan pada KSPPS Yaummi Mas menunjukkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan anggota, seperti pelatihan pengelolaan keuangan mikro dan digital marketing, namun skalanya masih perlu diperluas (*scaling up*) agar dampaknya lebih merata. Selain pembiayaan dan pelatihan, modal sosial (*social capital*) juga memiliki peran signifikan dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Melalui forum anggota dan praktik ta'awun (tolong-menolong), terbentuk jaringan informal yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, akses bahan baku, serta kolaborasi antar anggota koperasi.⁵⁶

Keterbatasan kapasitas internal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), seperti jumlah staf pendamping yang masih terbatas dan metode monitoring yang masih dilakukan secara manual, menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya seperti pelatihan staf (*staff training*), digitalisasi sistem pencatatan anggota, serta pengembangan sistem monitoring and evaluation (M&E) menjadi sangat penting agar lembaga dapat mengukur sekaligus meningkatkan dampak program pemberdayaan secara lebih terukur.⁵⁷ Berbagai studi terbaru membuktikan bahwa digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara signifikan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan dan efektivitas pendampingan anggota di lembaga keuangan mikro syariah.⁵⁸

Selain itu, hambatan akses pasar yang masih dialami oleh anggota menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara KSPPS dan pemangku

⁵⁵ Ayu Zahrani, Aldoriz Syahputra, Cici Regina Putri, Rizal, Ghita Ramadhayanti. *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Tinjauan Konseptual*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 10, Nomor 1: Januari – Juni 2025

⁵⁶ Mulyaningrum, Siti. "Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Anggota Koperasi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2023): 55–67.

⁵⁷ Rahman, Ahmad. *Manajemen Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 132

⁵⁸ Hidayat, R. & Setiawan, A. "Digital Transformation and Efficiency in Islamic Microfinance Institutions." *Journal of Islamic Financial Innovation*, Vol. 3 No. 1 (2024): 47–63.

kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah, dinas koperasi dan UMKM, pasar modern maupun tradisional, serta platform digital guna memperluas jangkauan distribusi produk anggota.⁵⁹ Kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan model ekosistem ekonomi syariah terintegrasi, yang dalam berbagai studi diidentifikasi sebagai strategi efektif untuk memperkuat rantai nilai halal dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM berbasis komunitas.⁶⁰ Lebih jauh lagi, literatur terkini menempatkan BMT/KSPPS tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan lokal. Dengan pengukuran dampak yang terstandarisasi serta integrasi kebijakan lokal, peran KSPPS dapat dioptimalkan sebagai katalis ekonomi kerakyatan berbasis prinsip syariah. Temuan lapangan di KSPPS Yaummi Mas memperlihatkan potensi besar tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan dalam sistem indikator dampak sosial dan ekonomi agar hasil pemberdayaan dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.

Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan secara rutin (rapat anggota) menjadi mekanisme pengendalian tata kelola yang penting. Keterlibatan anggota meningkatkan legitimasi program pemberdayaan dan menjaga orientasi kegiatan pada kepentingan anggota (member-driven). Praktik ini konsisten dengan prinsip koperasi yang banyak didukung literatur koperasi syariah. Mengenai instrumen produk, diversifikasi produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal seperti simpanan harian, pembiayaan untuk usaha musiman (pertanian/perikanan/Kontraktor), atau pembiayaan modal kerja mikro untuk menghasilkan respons anggota yang positif. Namun, pengembangan produk perlu disertai analisis risiko dan pelatihan produk agar implementasi sesuai prinsip syariah dan kelayakan usaha.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperbesar efek pemberdayaan yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dukungan tersebut dapat berupa insentif pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pasar, serta program kemitraan strategis antara koperasi, pelaku usaha lokal, dan lembaga keuangan syariah.⁶¹ Selain itu, akses ke program pembiayaan pemerintah maupun lembaga perbankan syariah dapat memperkuat kapasitas permodalan anggota dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro. Kebijakan yang

⁵⁹ Sari, Lilis Purnama. "Strategi Penguatan Akses Pasar bagi UMKM melalui Sinergi Koperasi Syariah dan Pemerintah Daerah." *Jurnal Koperasi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2024): 88-102

⁶⁰ Fadhilah, Rizky. *Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegrasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2023, hlm. 77

⁶¹ Fadhilah, Rizky. *Kebijakan Ekonomi Syariah Daerah dan Penguatan Kelembagaan Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2023, hlm. 114

berpihak pada penguatan ekosistem ekonomi syariah daerah terbukti mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis komunitas.

Di sisi lain, kajian akademik terkini menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas kelembagaan dan pelaporan dampak sosial ekonomi sebagai prasyarat agar peran BMT/KSPPS diakui dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal dan nasional. Penerapan sistem pelaporan berbasis kinerja (*performance-based reporting*) dan pengukuran dampak sosial (*social impact measurement*) dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, serta daya tarik KSPPS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs).⁶²

Kesimpulannya, KSPPS Yaummi Mas Cabang Cilacap telah berkontribusi nyata pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui akses pembiayaan syariah, program pembinaan, dan penguatan modal sosial. Namun, untuk meningkatkan skala dan keberlanjutan dampak, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, akses pasar bagi anggota, digitalisasi system yang mudah, serta kolaborasi formal dengan pemangku kepentingan lokal dan regional. Rekomendasi praktis mencakup program pelatihan lanjutan, pembangunan sistem monitoring & evaluasi berbasis data, serta fasilitasi kemitraan pemasaran bagi anggota.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Cilacap memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai strategi dan aktivitas kelembagaan. Strategi yang diterapkan meliputi integrasi dan institusionalisasi program kerja, prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberian reward atau doorprize bagi anggota yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, KSPPS berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, serta menciptakan jaringan usaha baik antaranggota maupun antarkoperasi. Selain itu, KSPPS turut membentuk kepribadian dan etos kerja Islami yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan ekonomi di tingkat lokal. Melalui peran dan strategi tersebut, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil, memperluas akses permodalan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Cilacap.

⁶² Hasanah, Nurul. *Pemberdayaan Ekonomi Syariah: Strategi dan Implementasi di Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 108.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abi Pratiwa, 2022. *Hukum dan Prinsip Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Ahmad Jazuli, 2023, Inklusi Keuangan Mikro Syariah bagi UMKM, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 1
- Andi Wijaya, 2021, Peran Pendampingan Lapangan dalam Pemberdayaan UMKM, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7 No. 1
- Antonio, M. Syafi'i, 2023, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Z. & Sari, D. 2023, Peran Partisipasi Anggota dalam Keberhasilan Koperasi Syariah, *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*, Vol. 5 No. 3
- Aulia Rahman. 2021, Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Peningkatan Usaha, *Indonesian Journal of Microfinance and Development*, Vol. 4 No. 1
- Ayu Zahrani, Aldoriz Syahputra, Cici Regina Putri, Rizal, Ghita Ramadhayanti. 2025. *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Tinjauan Konseptual*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 10, Nomor 1
- BPS Kabupaten Cilacap, *Profil Ekonomi Daerah 2024*
- D. K. Syafruddin, 2024. Tantangan Operasional KSPPS di Era Modern, *Jurnal Akuntabilitas Koperasi*, Vol. 6 No. 2
- Dewi, F. 2023, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Koperasi Syariah," *Jurnal Etika Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1
- Dokumentasi Data Internal KSPPS Yaummi Mas, Laporan Kinerja Cabang Cilacap 2024
- Dwi Setyaningsih. 2023, "Akses Pasar UMKM dan Tantangan Digitalisasi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, Vol. 6 No. 3
- Fadhilah, Rizky, 2023. *Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegrasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Fauzan, H. 2023, "Implementasi Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 2
- Hasanah, N. 2023, Sinergi KSPPS dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2
- Hasanah, Nurul. *Pemberdayaan Ekonomi Syariah: Strategi dan Implementasi di Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022
- Hasil Observasi Yaummi Maziyah Assaadah Cabang Cilacap
- Hasil Wawancara dengan kepala KSPPS Yaummi Maziyah Assaadah Cabang Cilacap
- Hendar & Kusnadi, 2022. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Hidayat, R. & Setiawan, A. 2024. "Digital Transformation and Efficiency in Islamic Microfinance Institutions." *Journal of Islamic Financial Innovation*, Vol. 3 No. 1

- Karim, Adiwarman A, 2023. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024, *Laporan Tahunan 2024: Transformasi Digital Koperasi Syariah*, Jakarta
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F. ., Salzabil, A. Z. ., & Jannah, M. 2025. Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang : Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 02
- Khoirudin, Juliana Juliana. 2025, *Digitalization Of Islamic Microfinance Institutions: Opportunities, Challenges, And Economic Implications For The Muslim Community*. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5, No 2
- Mar'atus Sholihah. 2023, Pemberdayaan Perempuan melalui Pembiayaan Mikro Syariah, *Gender and Community Development Journal*, Vol. 5 No. 2
- Maulida, R. & Santoso, E. 2023, "Peran KSPPS dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10 No. 1
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 2018, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Muhammad Nafik H.R. 2021, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
- Mulyaningrum, Siti. 2023. Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Anggota Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 9 No. 1
- Mulyaningrum, Siti. 2024. Peran KSPPS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No. 1
- N. Fadhilah & D. Darmawati. 2023, Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2
- Ningsih, S. & Harahap, F. 2024, "Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi Syariah," *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, Vol. 7 No. 3
- Ningsih, S. 2024, *Koperasi Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Nur Fitriana. 2022, "Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM Binaan Koperasi Syariah," *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, Vol. 5 No. 1
- Nurfadillah, S. 2023, "Kontribusi LKMS terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 12 No. 2
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2023. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat
- Prasetyo, H. 2024, "Digitalisasi Koperasi Syariah Pasca COVID-19," *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, Vol. 11 No. 1
- Pusporini, P., Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. 2025. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 03

- R. Kurniadi, 2022. Perputaran Ekonomi Lokal melalui Koperasi, *Local Economic Studies*, Vol. 2 No. 3
- Rachman, T. . 2022, Analisis Peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam Penguatan UMKM, *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 9 No. 2
- Rachmat Kurniawan. 2024, Digitalisasi Koperasi Syariah dan Penguatan Monitoring, *Journal of Cooperative and Community Empowerment*, Vol. 2 No. 1
- Rahman, Ahmad, 2023. *Manajemen Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahmawati, D. 2023, "Kendala Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Syariah," *Jurnal Ekonomi Umat*, Vol. 5 No. 2
- Ratna Puspita. 2022, "Kekuatan Forum Anggota dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Journal of Cooperative Studies*, Vol. 3 No. 1
- Riduwan, Amrullah, Danupranata, G., & Wahyudi, R. 2024. Microfinancing, Preference and Loyalty Analysis: A Study of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, Vol. 4, No.2
- Ritzer, George, 2023. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group
- S. Hartanto, T. Suparyanto & A. Azwar, 2023, "Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review", *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2)
- Sari, Lilis Purnama. 2024. "Hubungan Partisipasi Anggota dan Kinerja Koperasi terhadap Kesejahteraan Anggota." *Jurnal Koperasi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10 No. 1
- Sari, Lilis Purnama. 2024. "Strategi Penguatan Akses Pasar bagi UMKM melalui Sinergi Koperasi Syariah dan Pemerintah Daerah." *Jurnal Koperasi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10 No. 2
- Siti Rahmah & Diah Lestari. 2023, Produk Simpanan dan Pembiayaan Koperasi Syariah, *Journal of Islamic Finance and Society*, Vol. 4 No. 2
- Solikin, Solikin, Abdul Haris Romdhoni & Sumadi, 2024. *Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 02
- Suaidah & Zuhri M. Nawawi, 2024. "Tantangan Pengembangan LKMS melalui UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 7 No. 1
- Suryani, Tika & Hamdani, Dedi. 2024. "Integrasi Modal dan Pelatihan dalam Penguatan UMKM Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kewirausahaan*, Vol. 11 No. 2
- Sutrisno, Budi. 2023. "Partisipasi Anggota sebagai Kunci Keberhasilan Koperasi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat*, Vol. 8 No. 2
- Syamsul Huda, 2023, "Modal Sosial dalam Koperasi Syariah," *Al-Idarah*, Vol. 11 No. 1
- Syarifuddin, M. & Lestari, I. 2024., "Digitalisasi dan Efektivitas Koperasi Syariah," *Jurnal Inklusif Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1.

UNDP Indonesia, 2024, *SDGs Report 2024: Local Economic Empowerment through Islamic Finance*, Jakarta

Yunita, D. 2023., "Konsep Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Al-Mashraf*, Vol. 5 No. 1

Zuhdi, A. , 2023, *Maqashid Syariah dan Ekonomi Keadilan*, Bandung: Alfabeta